**Mendamaikan POLRI dan KPK**

**Moh. Mahfud MD**

Meskipunada yang membungkusdenganhalusdanmengatakanbahwatidakadakonflikantaraKPK dan POLRI melainkanhanyaadapersoalanoknumataudinamikatetapi*public common sense*menilaimemangadakonflikdankekisruhanantarakedualembagatersebut. Olehsebabharusadalangkah-langkahseriusuntukmendamaikannya.

**Mengapaharusdidamaikan?**

* Polisiharusadasebagairepresentasikekuasaannegara di bidangkeamanandanpenegakanhukum
* KPK sebagaianakkandungreformasiharuseksissesuaidengantujuanpembentukannyauntukmemperkuatpemberantasankorupsi.
* POLRI kitabukanhanyamegurusikorupsitetapijauhlebihluasdariitu yang sangatpentingbagikelangsungannegarauntukketertiban, keamanan, danketenteramanumum.Bayangkan, kalaunegaratanpapolisi yang efektif.
* Dalamtugas-tugasumumnya POLRI cukupprofesional. Misalnyadalampenangananterorisme, penculikan, mutilasi, narkobadansebagainya.
* Kalauadaisukorupsi di POLRI harusdilihatsebagaikasus yang biasasaja, seperti di lembaga-lembaga yang lain. Dilapangansangatbanyak orang-orang POLRI yangbersih, penuhdedikasi, danpatriotis.
* Olehsebabitu POLRI dan KPK harusbekerjadalamsinergisitas, bukandalamhubunganrivalitas.

**Mengapakitamembentuk KPK?**

* Menurut UU KPK ( dalamkonsideransMenimbang) penegakhukum yang adapadasaatitubelum optimal dalampemberantasankorupsipadahalkorupsisangatmembahayakanbagikeselamatanbangsadannegara.
* Padamasalalukorupsisangat massif, bahkanmenjadibagian yang takterhindarkanbagiperjalanankarierpejabat, pegawai, danorganisasi-organisasiprofesi.
* Idenya, kitabentuk KPK sampaikeadaan normal danpenegakhukummenjadi optimal danproporsional.
* Makaitu, menurutsaya, semula KPK itudimaksudkansebagailembagasementarauntukmendorongoptimalisasidanproporsionalisasilembagapenegakhukumlainnyadalampemberantasankorupsi.
* Tetapisetelah KPK suksesdalammelaksanakantugasnyamakaterjadiduahal. Pertama, ada yang menginginkandipermanenkan di dalamkonstitusi. Kedua, ada yang menyeranghebat agar diabubarkan.

**MengapaKonflikSampaiBerseri?**

* KPK bisabekerjacukupefektifdanberanimenyentuh area-area sensitif, termasuk POLRI bahkanlembagakepresidenan (kabinet). Di lingkungan POLRI pernahadakasusRusdiharjo, SuyitnoLandung, beritarekeninggendut, kasus simulator SIM, dan lain-lain.
* MuncullahCicak-Buaya I (Antasari, Bibit, Chandra, SusnoDuaji), Cicak-Buaya II (DjokoSusilo, Novel Baswedan), danCicakBuaya III (Budi Gunawan, BambangWidjoyanto, Abraham Samad).
* Potensikonflikberseriinimasihterbukadanharussegeradiakhiridengankeharusanberkompromidengansituasi (misalnyatidakmemperioritaskansoalrekeninggendut agar kasus-kasus di area lain bisaberjalan)

**Penyelesaianpadakonflik yang lalu**

* KonflikJilidI :Presidenmembentuk Tim 8 yang berujungdikeluarkannya SKPP untukBibitdan Chandra. Adapun proses hukumuntukAntasarisudahberlangsungjauhsehinggasulitditarikketitikawal. PresidenjugamengeluarkanPerppuNo. 4 Tahun 2009 tentangPelaksanaTugasPimpinan KPK. Padakonflikjilid I initerjadijuga problem antara POLRI dan MK menyusulpenyetelanrekamanpembicaraanAnggodo, tetapiakhirnyaselesaidenganbaiksampaisekarang.
* KonflikJilidII :PresidenmemerintahkanpenanganankasusDjokoSusilotetapditeruskan di KPK, sementarakasus Novel Baswedanharusmencariwaktu yang tepat (Presidenmenyebutpenanganankasus Novel saatituwaktunyatidaktepat).
* KonflikJilid III : Presidentidakmelantik BG, mengeluarkanPerpputentangpelaksanaTugas KPK.
* KonflikJilid III jauhlebihrumitdanlebihberatdanrumitkarena POLRI mendapatdukunganterang-terangandarisebagianterbesarparpol-parpoldan DPR secararesmi. KalaudalamJilid I dan II dukunganParpoldan DPR tidakmunculsecaraterang-terangan, apalagiresmi.

**KemelutdalamKonfikJilid III**

* Momentum penetapan BG tidaktepat, dilakukansetelah BG diajukansebagaicalonkapolri.
* Memangadaunsurpolitisnya yang bersifatetis (adalatarbelakangpolitis yang melibatkan Abraham Samad).
* Budi GunawandengandukunganbantuanhukumdariPOLRI mengajukanpraperadilandanmenersangkakanduakomisioner: BambangWidjoyantodalamkasuskesaksianpalsu, Abraham Samaddenganpemalsuandokumen)
* Soalsangkaanpada BW sebenarnyasudahpernahdicabutlaporannyatapidilaporkanlagi. Dan seharusnyamelaluipemeriksaanetikoleh PERADI lebihdulu.
* Soalsangkaanpada Abraham Samad, kalaubenarhanyasoalpencantumannamaseseorangkedalamKartuKeluarga, sebenarnyayuridisnyamasukdalam mala prohibita yang ditarikkepemalsuan , tetapipelanggaranetisnyalebihserius. Sebagaiketua KPK diaseharusnyatidakbolehberbicarapolitik, apalagiuntukdirinya, denganpolitisi.

**Penyelesaiandanpenataankedepan**

***MasaTransisi***

* Untukjangkapendek yang perludilakukanadalahmendamaikan KPK dan POLRI melaluipembicaraandarihatikehatiantarPimpinankeduainstitusi. Pimpinan KPK yang meliputiPelaksanaTugasPimpinan KPK dan yang masihadaharusmenyepakatipembagiantugassertaperandansalingmemberiinformasitentangtindakan-tindakanhukum yang akandilakukanterutamajikamenyangkutkeduainstitusi.
* Mungkinadabeberapakasus yang perludiendapkanlebihdulu yang terkaitdengan POLRI sehinggapenanganan yang terkaitdenganinstansilaintidakterganggu. Hal yang samaharusharusdilakukandengankejaksaanagung. IniharusbisadiselesaikandalammasatransisimasatugasPlt.KPKsampaibulanDesember 2015.

***JangkaPanjang***

* Untukjangkapanjangharussegeradilakukanpemutusanhubungandengankasus-kasusmasalalu. Sepertiterlihatnyata, upayapemberantasankorupsikerapkaliterperangkapsalingsanderakarenakasus-kasusmasalalu yang kusutmasai.
* Tidakmendramatisirsebagaiisukorupsimasalah-masalah yang sebenarnyabersifatkebijakan (policy). Dalamkasus Bank Centuryatau BLBI, milsalnya, harusdibedakanantarapilihankebijakandantindakpidananya. Kebijakantidakdapattidakperludibawakeranahpidana, tetapitindakpidanadalamimplementasinyadapatdipidanakan.
* Perluditetapkanpilihantentangtitikmemutushubungandenganmasalalu, apakahmemilihkebijakanlustrasi*(lustration policy)*ataupengampunannasional*(national parden).*
* Setelahpenentuantitikitu, tanpadibelengguolehkasus-kasus lama yang kusutmasai, penindakanataskasus-kasuskorupsiharusdilakukantanpatoleransi.